

## Edukasi Pendidikan Politik Kepada Peserta Didik Di SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan

Irwan Abbas<sup>1</sup>, Wahyudin Noe<sup>2</sup>, Syahril M. Muhammad<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Prodi PPKn Universitas Khairun

Email: [wahyudinnoe@unkhair.ac.id](mailto:wahyudinnoe@unkhair.ac.id),

---

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Character Building;  
Students;  
SMP Negeri 2 Kota Tidore  
Kepulauan;

---

**Article history:**

Received 2023-10-14  
Revised 2023-10-12  
Accepted 2023-10-15

---

### ABSTRACT

Currently, the Indonesian nation will be faced with the 2024 general election (Pemilu) both at the national level by electing the president, vice president and representatives of the DPR RI, as well as at the regional level in electing the governor, deputy governor, regent/mayor and DPRD. However, on the other hand, the potential for fraud in elections can occur in all areas, such as money or transactional political practices which can reduce the quality of the election itself. To minimize this, it is necessary to involve academics such as lecturers and students to provide political education to the community, especially the younger generation such as students. Therefore, lecturers from the PPKn FKIP Study Program at Khairun University together with students held service activities at SMP Negeri 2 Tidore Islands City, North Maluku. This aims to foster students to have civic awareness in exercising their right to vote where a positive track record is the main consideration in selecting candidates. This activity uses lecture and discussion methods in the form of FGD (focus group discussion). The series of activities starts from location observation, coordination with school leaders, program implementation, and evaluation. The result of this activity is that students at SMP Negeri 2 Tidore Islands City will have political knowledge and awareness from an early age as a provision for making appropriate political decisions in the future. It is hoped that students will have good character within themselves which includes aspects of knowledge, attitudes and behavior so that in the future they will become good and educated members of society and future leaders of the nation.

**Keywords:** Political Education, Students, SMP Negeri 2 Tidore Islands City

## PENDAHULUAN

Kata politik dalam KBBI (Poerwadaminta, 1983:763) diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya). Kata politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*. Kedua kata tersebut berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota) (Situmorang, 2016: 35). Sedangkan menurut Budiardjo (1980: 8), politik secara umum dikatakan adanya bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif Islam, menurut Ibnu Manzhur (Diana, dkk. 367-368), politik dalam bahasa Arab diistilahkan “siyasah”, berasal dari kata *sâsa-yasûsu-siyâsatan*, artinya mengurus, mengatur, dan memerintah. Secara terminologis, siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara mendatangkan kemaslahatan atau membuat kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dengan demikian politik dapat disimpulkan sebagai prinsip, kegiatan, sarana, ataupun siasat untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun pendidikan politik adalah proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan berupa nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999:117). Jika dibawa ke ranah persekolahan maka pendidikan politik merupakan proses pewarisan nilai dan norma dan moral kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa agar terbuka cakrawala berpikir serta kesadaran dalam mengambil sikap dan pilihan politik tertentu. Kecerdasan dan kebajikan warga negara sangat diperlukan sebagai syarat untuk menentukan pilihan politik, sebab politik sangat mulia karena bertujuan untuk mengembangkan karakter warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Warga negara dalam bidang kehidupan politik hendaknya berpartisipasi aktif dan dapat mengambil keputusan politik yang cerdas. Terlebih dewasa ini, menjelang Pemilu 2024 sangat diperlukan adanya pendidikan politik terhadap warga negara agar mengerti hak dan kewajibannya. Terutama pelajar, sebagai warga negara muda (*young citizen*) perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman politik sejak dini sebagai bekal dalam berpolitik yang berdasarkan pada pertimbangan rasional dan obyektif. Hal tersebut dimulai dari sikap pembiasaan (habituasi), salah satu contohnya melalui proses pemilihan ketua OSIS dimana seseorang yang memenuhi persyaratan dan berminat menjadi ketua OSIS dapat mencalonkan diri. Panitia akan memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk tampil didepan seluruh siswa dan menyampaikan visi, misi, serta program unggulan yang akan dilakukan jika kelak terpilih menjadi ketua OSIS. Tahapan selanjutnya, para siswa diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya (aspirasi politiknya) secara langsung, bebas dan rahasia di dalam bilik kosong yang telah disediakan. Kemudian hasil akhir dari proses pemilihan ketua OSIS tersebut akan diumumkan oleh panitia dimana kandidat yang meraih suara terbanyak dinyatakan menjadi ketua OSIS.

Dari penjelasan proses diatas, pada hakikatnya peserta didik diarahkan bukan hanya memahami politik, namun lebih jauh lagi yakni mampu menyadari dan melaksanakan pilihan politiknya secara mandiri dan bertanggung jawab. Pembiasaan merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter. Pembiasaan tidak saja di persekolahan, namun perlu ditularkan ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, dimana anak dan orang tua berupaya untuk membangun interaksi dan komunikasi secara dialogis, serta saling menghargai pendapat satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Sikap pemaksaan diri orang tua harus dihindari dan memberi kebebasan kepada anak jika itu berkaitan dengan masa depannya. Orang tua dapat memberikan pertimbangan dan pengalaman yang baik namun keputusan dikembalikan kepada anak yang bersangkutan untuk menjalani pilihannya tersebut. Demikianpun di masyarakat dimana sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan sikap politik sebagai modal dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan politik di SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan perlu dilakukan melalui kegiatan FGD sebagai implementasi Tri Dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. FGD ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan saling berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik sendiri akan mengalami proses pembelajaran yang berharga sehingga kelak dapat turut terlibat langsung dalam menentukan nasib bangsa dan negara yang lebih maju, sejahtera serta bermartabat.

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan FGD dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023 di Aula SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Peserta dalam kegiatan ini yaitu Kepala Sekolah beserta guru-guru, peserta didik berjumlah 35 orang, serta dosen Program Studi PPKn FKIP Unkhair berjumlah 10 orang. Adapun yang menjadi narasumber di kegiatan FGD ini yaitu: Kepala Sekolah, Guru PPKn, serta dosen-dosen Program Studi PPKn FKIP Unkhair.

Metode yang digunakan pada kegiatan FGD meliputi ceramah dan diskusi dimana narasumber memaparkan materi terkait pendidikan politik dengan menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan proses diskusi bersama peserta didik. Metode ceramah adalah metode pengajaran dengan cara penyampaian informasi serta pengetahuan melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa (Fifadhilni, 2022:3), sedangkan metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengusulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah (Supr iyati, 2020:106).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sasaran Pengabdian**

Adapun yang menjadi sasaran pengabdian melalui kegiatan FGD tersebut adalah peserta didik dan guru-guru SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara sejumlah 35 orang.

### **2. Langkah-Langkah Kegiatan**

Langkah-langkah program pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

a. Observasi lokasi

Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi lokasi pengabdian.

b. Koordinasi dengan Pimpinan Sekolah

Koordinasi dilakukan langsung kepada Kepala Sekolah dengan maksud meminta kesediaan dalam menerima kunjungan dosen dan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Unkhair dalam rangka melaksanakan program FGD beserta arahan terkait waktu kegiatan FGD.

c. Pelaksanaan program

FGD dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi oleh narasumber yang selanjutnya didiskusikan bersama guru-guru dan peserta didik.

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menganalisis sejauhmana pelaksanaan kegiatan FGD dengan maksud menjadi pembelajaran untuk perbaikan kegiatan FGD selanjutnya.

### **3. Pelaksanaan Pendidikan Politik di Sekolah**

Hasil kegiatan FGD yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan

melalui metode ceramah dan diskusi seputar dinamika kegiatan politik yang berjalan di sekolah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Pertama, pendidikan politik sebagai wahana menanamkan nilai dan norma dalam politik.** Penanaman nilai dan norma politik pada peserta didik salah satunya melalui kegiatan kesiswaan, diantaranya OSIS, Pramuka, PMR, dan Rohis. Pada keempat organisasi ini dibelajarkan mengenai bagaimana mengelola organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan tersebut didasarkan pada nilai dan norma sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Pengelolaan organisasi tersebut merupakan suatu bentuk pendidikan dalam hal ini pembiasaan (habitiasi). Menurut Gunawan (2014:93) bahwa “pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter”. Contoh lainnya dari pendidikan politik terkait pembiasaan di sekolah yakni dibelajarkan melalui proses pemilihan ketua OSIS dimana seseorang yang memenuhi persyaratan dan berminat menjadi ketua OSIS dapat mencalonkan diri dan belajar menyampaikan program-program yang diusung, serta setiap peserta didik akan terlibat secara langsung dalam menyalurkan hak suara.

Pendidikan politik sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan perihal politik agar warga negara memahami dan memperlihatkan perilaku politik yang baik, sebagaimana pendapat Surbakti (1992:117) pendidikan politik adalah “proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan berupa nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik”. Sedangkan menurut Rusadi (2004), pendidikan politik meliputi “*political education, political socialization, citizenship training* yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik warga negara dan akhirnya warga negara melek politik”. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan politik merupakan suatu keharusan dilakukan agar orang-orang yang terlibat dalam politik memiliki tujuan yang baik, bukan sebaliknya memperlihatkan sikap dan perilaku yang negatif (bebas nilai) dimana melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara. Hal tersebut terlihat dari fenomena saat ini dimana banyaknya persoalan politik yang berdampak buruk terhadap masyarakat akibat perilaku para elite politik, seperti politik uang (*money politics*), adu domba antar kelompok ataupun memfitnah kelompok lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Tindakan demikian jauh dari nilai-nilai dan norma dalam politik itu sendiri. Padahal sebaliknya justru politik itu memiliki syarat nilai yang harus menjadi pegangan bagi setiap orang sehingga hasilnya membawa pada suatu kebaikan bersama. Nilai yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila yaitu politik yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan (demokrasi), serta nilai keadilan bagi setiap warga negara. Jika nilai-nilai ini dipegang dan dijalankan maka politik memiliki muatan nilai kebaikan untuk membentuk karakter yang baik (*good character*) warga negara.

Selain itu pendidikan politik di sekolah dibelajarkan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn sebagai wahana pendidikan politik dapat diartikan PKn merupakan program akademik yang membelajarkan kepada warga negara atau peserta didik untuk memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku serta karakter yang baik di bidang politik yang mampu mewujudkan suatu kehidupan yang demokratis, beradab serta berkeadilan sosial. Menurut Udin S. Winataputra (Noe, dkk, 2021:47) bahwa “secara filosofis, PKn memegang misi suci (*mission scare*) untuk pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Jadi keterkaitan antara PKn dengan Pendidikan Politik memiliki misi yang sama yakni membelajarkan peserta didik untuk belajar tentang demokrasi sehingga memiliki kepribadian yang demokratis.

**Kedua, pendidikan politik bersumber pada nilai-nilai agama.** Melalui kegiatan FGD, nilai-nilai Islam ditanamkan kepada peserta didik. Dalam ajaran Islam terdapat tuntunan mengenai masalah-masalah politik. Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah

agama yang paripurna (syamil), lengkap dan mutakamil. Semuanya telah ditetapkan dalam ajaran Islam yang mulia, mulai dari yang kelihatan dianggap remeh temeh (kecil) sampai masalah-masalah yang besar, termasuk dalam urusan politik. Islam adalah agama yang sempurna dan harus dipahami dengan baik oleh setiap insan yang mengaku muslim. Berbicara masalah politik, mengutip pendapat salah seorang pemuka agama di negeri ini, yakni Ustadz K.H. Muhammad Zaitun Rasmin selaku pengurus MUI dan Pimpinan Umum Wahdah Ismiah (2023) bahwa “politik adalah salah satu urusan yang sangat diperhatikan dalam Islam. Urusan untuk kemaslahatan individu saja diatur, apalagi urusan yang menyangkut kemaslahatan umat, bahkan kemaslahatan umat manusia seluruhnya”. Selanjutnya menurut beliau bahwa:

Al-Quran dan hadits jika dikaji secara mendalam, dipenuhi dengan berbagai ajaran politik, baik bagaimana cara memperoleh, menjalankan, begitu pula dalam hal pergantian kekuasaan. Bahkan porsi bahasan politik dalam Al-Quran lebih banyak jika dibandingkan pembahasan mengenai kaifiyah (tatacara) pelaksanaan sholat. Buka berarti sholat tidak lebih penting. Ibadah sholat itu berkaitan dengan ibadah personal, sedangkan politik itu berkaitan dengan kemaslahatan umat (kepentingan bersama).

Penjelasan di atas menegaskan bahwa politik telah diatur dalam agama Islam yang dikenal dengan istilah ‘siyasah’ yang artinya mengurus, mengatur dan memerintah. Mengatur maksudnya melalui politik masyarakat atau umat diatur dan diarahkan pada kemaslahatan/kebaikan. Pemegang kekuasaan seperti pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Amanah dapat dipertanggung-jawabkan tidak saja kepada rakyat namun akan dipertanggung-jawabkan pula kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Faktanya, fenomena di masyarakat terkadang berbicara lain dimana kekuasaan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi semata, keluarga ataupun golongan tertentu saja. Rakyat atau ummat pada umumnya tidak memperoleh rasa keadilan dan jauh dari perhatian penguasa/pemerintah. Kondisi demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Demikian Islam mengajarkan betapa pentingnya memahami dan menyadari kekuasaan sebagai jalan menuju kemaslahatan. Oleh karena itu pendidikan politik perlu disosialisasikan terus-menerus kepada masyarakat terutama generasi muda agar kedepannya politik bangsa ini lebih berkeadilan dan bermartabat, sebagaimana pernyataan Abdurrahman Wahid (Islamy, 2021:61) bahwa “ajaran agama Islam bersifat universal melampaui segala ruang dan waktu. Namun universalisme ini bukan terletak pada kedetailan ajarannya, akan tetapi pada prinsip ajarannya, seperti keadilan, kemaslahatan dan memiliki fleksibilitas dalam menyikapi problematika manusia”.

### **Dokumentasi Kegiatan FGD di SMP Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan**



(a)



(b)

**Gambar 1. Suasana kegiatan FGD Pendidikan Politik di SMP Negeri 2 Kota Tikep:**

(a) Sesi Panel Pertama (ceramah); (b) Sesi Panel Kedua (tanya jawab)

**KESIMPULAN**

Mengingat pentingnya pendidikan politik bagi peserta didik hendaknya sejak dini disosialisasikan dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanamkan nilai dan norma politik sebagai bekal untuk memiliki kompetensi kepribadian yang baik yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga tepat dalam mengambil keputusan politik di kemudian hari. Pendidikan politik di persekolahan dapat diselenggarakan melalui pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan politik dan diselenggarakan dalam bentuk pembiasaan (habituaasi) perilaku peserta didik pada kegiatan organisasi kesiswaan, seperti OSIS, Pramuka, PMR dan Rohis. Pendidikan politik penting diketahui baik terkait fungsi, tugas, hak maupun kewajiban sebagai warga negara. Harapannya setelah pelaksanaan FGD, peserta didik mendapatkan pembelajaran dan pengetahuan politik yang berharga yang terekam dalam memori mereka sehingga kelak akan menjadi anggota masyarakat dan calon pemimpin bangsa masa depan yang terdidik demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budiardjo. Miriam (1980). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Diana, R., Masruri, S. & Surwandono, S. (2018). Etika Polotik dalam Perspektif Al-Marwardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363-384.
- Fifadhilni, S. M. (2022). Teknik Kombinasi: Metode Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab. *Unpublished Manuscript, Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Riau, Riau*, 1-7.
- Gunawan, H. (2014). *Pendidikan karakter; konsep dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, Athoillah (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 51-73.
- Rusadi, Kantaprawira (2004). *Sisten Politik Indonesia*, Suatu Model Pengantar, edisi revisi. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Poerwadarminta (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasmin, M. Z. (2023). *Perpolitikan Indonesia adalah Anugerah dan Tantangan, Partisipasi Umat Harus Kongkret*. Jakarta [online]. Diakses dari <https://zaitunrasmin.id/artikel/perpolitikan-indonesia-adalah-anugerah-dan-tantangan-partisipasi-umat-harus-kongkret/>. 17 Desember 2023.
- Situmorang, Jubair (2016). *Etika Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surbakti, Ramlan (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Supriyati, I. (2020). Penerapan metode diskusi dalam pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa kelas VIII MTSN 4 Palu. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 5(1), 104-116.
- Noe, W., Hasmawati, H., & Rumkel, N. (2021). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter menurut pemikiran Udin S. Winataputra. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1).